

# ANALISIS KORELASI DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA), TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Junnely D. Busdan<sup>1</sup>, Agnes L.Ch.P. Lapian<sup>2</sup>, George M.V. Kawung<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : [junebusdan1012@gmail.com](mailto:junebusdan1012@gmail.com), [agneslapian@unsrat.ac.id](mailto:agneslapian@unsrat.ac.id), [georgekawung@unsrat.ac.id](mailto:georgekawung@unsrat.ac.id)

## ABSTRAK

Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dari pemerintah kabupaten diantaranya terdapat pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Objek penelitian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tenggara tahun 2011-2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui korelasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), terhadap Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara, peneliti menggunakan analisis korelasi Uji Korelasi Product Moment (Pearson). Dengan bantuan program Eviews versi 8.0. Hasil korelasi Dana Bagi Hasil (DBH) ada hubungan secara signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada hubungan secara signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ada hubungan secara signifikan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan Belanja Modal.

**Kata Kunci :** Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Belanja Modal.

## ABSTRACT

*Sources of funding for carrying out activities from the district government include local original income, balancing funds, etc. From legitimate income. The research object is the report on the realization of the regional income and expenditure budget of the Southeast Minahasa Regency Regional Financial and Revenue Management Agency for 2011-2022. The research aimed to determine the correlation between Profit Sharing Funds (PSF), Original Regional Income (ORI), Surplus Budget Financing (SBF), and Capital Expenditures in Southeast Minahasa Regency, researchers used correlation analysis of the Product Moment Correlation Test (Pearson). With the help of the EViews version 8.0 program. The correlation results of Profit-Sharing Funds (PSF) with it is concluded that there is a significant relationship between Profit Sharing Funds (PSF) and Capital Expenditures. Original Regional Income (ORI) it can be concluded that there is a significant relationship between Original Regional Income (ORI) and Capital Expenditure. Surplus Budget Financing (SBF), it can be concluded that there is a significant relationship between Surplus Budget Financing (SBF) and Capital Expenditures.*

**Keywords:** Profit Sharing Funds (PSF), Original Regional Income (ORI), Surplus Budget Financing (SBF), Capital Expenditures.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk sekarang dan masa depan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan

wilayah, khususnya transformasi infrastruktur adalah prioritas program atau proyek infrastruktur yakni melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan peraturan menteri perekonomian no 9 tahun 2022, saat ini pemerintah tengah berusaha menyelesaikan 200 Proyek Strategis Nasional dan 12 Program Strategis Nasional. Program Strategis Nasional adalah proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik dan telekomunikasi. Pembangunan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, hingga pendidikan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada, indikator yang paling mempengaruhi adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, kegiatan pembangunan dari pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur, memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara menunjukkan perkembangan di berbagai bidang pembangunan dari tahun ke tahun, ini ditunjang dengan keberadaan sektor potensial yang dimiliki Kabupaten Minahasa Tenggara, diantaranya sektor pertambangan dan penggalian, sektor ekonomi pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan nilai LQ kedua tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu rata-rata sebesar 1,61. Aktivitas sektor ini meliputi seluruh kegiatan penggalian, pengeboran, penyaringan, dan pengambilan semua jenis barang tersedia di alam. Dengan adanya pembangunan di daerah akan mendorong kegiatan perekonomian pada daerah tersebut, jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat akan melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, selain itu dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, UU tersebut diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*). UU No 33 Tahun 2004 yang telah dicabut dan diganti dengan UU N0 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Tujuan program otonomi daerah sendiri mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah (Sularno, 2013)<sup>1</sup>. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain kewenangan terdapat sistem transfer antar level pemerintahan (Kuncoro, 2014)<sup>2</sup>. Sementara itu, pengalihan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah berimplikasi terhadap peningkatan alokasi dana

<sup>1</sup> Sularno, 2013

<sup>2</sup> Kuncoro, 2014

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah melalui dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Perimbangan mengenai keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah pusat akan ideal jika disetiap pemerintahan bebas dalam pembiayaan untuk menjalankan otoritas dan kewajiban sendiri-sendiri akan dapat menciptakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal. Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dari pemerintah kabupaten diantaranya terdapat pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut (Nurul, 2013)<sup>3</sup>. Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi PAD yang dimiliki dengan memaksimalkan sumber daya untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah dan bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Belanja daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung (permendagri no 25 tahun 2009) merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Darwanto & Yustikasari (2007) terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal, semakin tinggi PAD maka belanja modal akan tinggi. Adapun belanja langsung melalui belanja modal merupakan salah satu bentuk belanja yang mampu mewujudkan bertambahnya infrastruktur dan sarana publik daerah. Adapun besaran alokasi belanja langsung dan belanja modal ditentukan dari seberapa besarnya PAD, sehingga daerah harus mengoptimalkan penerimaan PAD jika ingin meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiscal (Nuarisa 2013)<sup>4</sup>. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

<sup>3</sup> Nurul, 2013

<sup>4</sup> Nuarisa, 2013

anggaran selama satu periode anggaran. Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya kemudian dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Membedakan penelitian ini dari yang lain adalah data yang diambil berbeda kabupaten, dengan tahun penelitian yang berbeda, variabel yang diteliti ada empat variabel. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, berikut ini disajikan data awal Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2022.

**Tabel 1**  
**Dana Bagi hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD),**  
**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap anggaran BELANJA MODAL**  
**Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara**

TAHUN	DBH (Jutaan Rupiah)	PAD (Jutaan Rupiah)	SILPA (Jutaan Rupiah)	BELANJA MODAL (Jutaan Rupiah)
2011	17.724	4.939	80.625	140.498
2012	18.718	4.810	57.541	124.643
2013	16.834	8.920	35.918	112.001
2014	17.620	14.633	70.310	183.108
2015	13.161	17.776	85.453	229.899
2016	15.258	19.286	74.696	311.528
2017	14.040	32.767	54.197	194.716
2018	14.703	18.632	44.920	158.495
2019	13.200	21.152	70.843	105.719
2020	11.902	17.451	67.460	172.759
2021	27.898	16.360	66.802	107.616
2022	32.425	13.686	33.506	113.304

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Dapat dilihat dari tabel 1 perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dan Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2011 sampai pada tahun 2022 terus menerus mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), SILPA yang cukup signifikan di Kabupaten Minahasa Tenggara, tentunya membuat perekonomian juga ikut bergerak ke arah yang lebih dinamis, sehingga menimbulkan minat dari pelaku usaha maupun pemodal untuk dapat menanamkan investasinya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dana Bagi hasil (DBH) tiap tahun mengalami fluktuasi karena adanya kenaikan dan penurunan target penerimaan negara yang dibagikan pada RAPBN yang disebabkan oleh perkiraan terjadinya penurunan harga komoditas minerba. Kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-

19 dimana 8% alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan Covid-19. Saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten Minahasa Tenggara terkait dengan sedikitnya PAD, karena minimnya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendahnya kualitas SDM dibidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah yang mengakibatkan PAD rendah, dikarenakan masih banyak potensi-potensi daerah yang belum tergali, seperti potensi kemaritiman dan kepariwisataan. Covid-19 memberikan dampak pada PAD karena beberapa sektor usaha dengan pendapatan pajak tinggi seperti restoran dan hotel mengalami penurunan pendapatan. Sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No 26 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran. Pendapatan Retribusi Daerah juga mengalami penurunan karena untuk tempat rekreasi dan olahraga ditutup sementara selama masa pandemi Covid-19, dan petugas pelayanan parkir dialihkan ke penanganan Covid-19 untuk menjaga posko Covid-19. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Minahasa Tenggara berfluktuasi karena kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang telah dianggarkan, kelebihan alokasi dana, atau adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi realisasi anggaran. Dengan adanya Covid-19, terjadi refocusing anggaran sehingga menyebabkan perubahan dan pergeseran anggaran, keterlambatan transfer dana bagi hasil (DBH) dari pusat ke daerah. Belanja Modal mengalami fluktuasi karena persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan dengan adanya Covid-19 pemerintah mengurangi Belanja Modal. Isu utama yang dihadapi adalah Covid-19, sehingga kebijakan setiap daerah lebih memfokuskan terhadap belanja program bidang kesehatan dan bantuan social. Terdapat gap antara kebijakan desentralisasi untuk pembangunan dengan upaya pembiayaan pembangunan yang berasal dari keuangan daerah, dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka isu strategis tentang ketimpangan keuangan vertical maupun horizontal, tingginya gap pelayanan publik antara daerah maju dan daerah tertinggal, besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer karena belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah serta pelaksanaan anggaran daerah yang belum berkualitas bisa teratasi, dengan adanya UU No 1 Tahun 2022 maka bisa mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal, melalui beberapa kebijakan dan pengaturan. pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan melalui penajaman peran pemda dalam menambah sumber-sumber pendapatan asli daerah. Perubahan kebijakan dimaksud dilakukan dengan simplifikasi dan restrukturisasi jenis dan tarif pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan daerah sangat penting untuk menambah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program-program penyediaan layanan dasar publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pemerintah melakukan *redesign* pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan antar daerah.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka kajian dari penelitian ini penulis mengangkat judul ***“Analisis Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Minahasa Tenggara”***.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara?
2. Bagaimana Korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara?

3. Bagaimana Korelasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara?

### Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Mengetahui Korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Mengetahui Korelasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara.

### Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai bahan referensi pengkajian masalah dalam penelitian ini.
  - b. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori Akuntansi Sektor Publik (ASP).
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, penelitian ini bisa mengoptimalkan potensi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi peningkatan, dengan penelitian ini bisa bermanfaat bagi peningkatan kualitas daerah khususnya pelayanan asset.
  - b. Penelitian ini bisa memberikan referensi bagi pengembangan konsep mengenai bagaimana korelasi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap anggaran belanja modal, korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal, korelasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap anggaran belanja modal.

### Tinjauan Pustaka

#### Landasan Teori

- **Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2012)<sup>5</sup> pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan.

- **Anggaran**

Anggaran Negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain pihak memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Abdullah (1995)<sup>6</sup> anggaran adalah proses penjabaran rencana ke dalam angka kuantitatif (uang) yang disusun dalam secara sistematis dalam perkiraan pendapatan, belanja, (dan pembiayaan). Sedangkan Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Bastian (2001)<sup>7</sup> anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

<sup>5</sup> Halim, 2012

<sup>6</sup> Abdullah, 1995

<sup>7</sup> Bastian, 2001

- **Belanja Modal**

Belanja modal menurut Mardiasmo (2009)<sup>8</sup> adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk

- **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Upaya memperkecil ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*) dilakukan melalui penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah yang diikuti dengan implikasi pendanaan ke daerah. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal vertikal (perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal antara pusat dengan daerah). Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*, dimana DBH dibagi denganimbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar. UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah menurut Listiorini dalam (Susanti & Fahlevi, 2016)<sup>9</sup>. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen Dana Bagi Hasil, kecuali Dana Bagi Hasil perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota, penyaluran Dana Bagi Hasil baik pajak maupun Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 23, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. UU No 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008)<sup>10</sup>. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko, 2002:55)<sup>11</sup>. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat

<sup>8</sup> Mardiasmo, 2009

<sup>9</sup> Susanti & Fahlevi, 2016

<sup>10</sup> Yani, 2008

<sup>11</sup> Suparmoko, 2002:55

sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009)<sup>12</sup>. Bratakusuma & Solihin (2002)<sup>13</sup> mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan untuk guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku, sektor pendapatan daerah memegang peranan sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric 2017)<sup>14</sup>.

- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang nantinya dapat digunakan pada tahun berikutnya. SILPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NNT dalam Nurachman, 2015)<sup>15</sup>. Dalam struktur APBD, terdapat penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Selisih antara penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran disebut surplus atau defisit. Surplus terjadi ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Jika sebaliknya maka disebut defisit. Struktur pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ini disebut pembiayaan netto. SiLPA merupakan selisih dari surplus/defisit dengan pembiayaan netto.

### Penelitian Terdahulu

Margono (2021)<sup>16</sup> dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan SILPA terhadap Belanja Modal, tujuan penelitian untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan SILPA terhadap Belanja Modal metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif, memakai data sekunder, menggunakan metode purposive sampling, hasil penelitian berdasarkan hasil riset Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai positif terhadap Belanja Modal dilihat dari hasil pengujian SPSS.

Tryas Chasbiandani, Rafrini Amyulianthy, Anisa May (2022)<sup>17</sup> Vol 2 No 3 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal, tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal, metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini

<sup>12</sup> Darise, 2009

<sup>13</sup> Bratakusuma & Solihin, 2002

<sup>14</sup> Baldric, 2017

<sup>15</sup> Nurachman, 2015

<sup>16</sup> Margono, 2021

<sup>17</sup> Tryas Chasbiandani dkk, 2022

menggunakan teknik regresi yaitu data panel yang artinya gabungan antar kedua jenis data yaitu data cross-section dan time series, hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Faisal Humiang, Hendrik Manossoh, Peter Kapojos (2022)<sup>18</sup> Vol 5 No 2 dengan judul Analisis Kontribusi Komponen Penerimaan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bitung, tujuan penelitian untuk mengetahui Kontribusi Komponen Penerimaan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bitung, metode penelitian yang digunakan adalah Metode Analisis deskriptif, hasil penelitian Pendapatan Asli daerah (PAD) memberikan kontribusi dengan kriteria baik pada alokasi belanja modal, Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan kontribusi dengan kriteria sedang, Dana Alokasi Umum (DAU) sangat baik, Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat baik.

Marselina A. Pekambani, M.E. Perseveranda, Rere P. Bibiana (2023)<sup>19</sup> Vol 7 No 2 dengan judul *Effect of Local own source revenue, general allocation funds, special allocation funds, and profit-sharing funds on capital expenditure*, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil terhadap Belanja Modal, metode penelitian yang digunakan pengambilan sampel probabilitas, hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap Belanja Modal di Nusa Tenggara Timur.

Choms Gary Ganda Tua Sibarani, Jihen Ginting, Vivi Afriliani, Nasrullah Hidayat (2022)<sup>20</sup> Vol 3 No 2 dengan judul *Influence of Profit Sharing Funds and Regional Financial Performance in the Previous Year on the Allocation of Capital Expenditures in Provincial Governments in Indonesia in 2016 – 2020*, tujuan penelitian untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil, rasio kemandirian daerah tahun sebelumnya, efektivitas tahun sebelumnya, keselarasan tahun sebelumnya, terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020, metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan uji deskriptif dengan metode asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 22, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim, Imam Novayandi (2021)<sup>21</sup> dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal, tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal pada daerah Kab / Kota di Prov. Jawa Barat dan menggunakan 14 sampel Kab / Kota yang ada di prov. Jawa Barat yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), data yang didapat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Dalam observasi ini memakai metode regresi linear berganda dengan uji hipotesis menggunakan t statistic, F statistic dan koefisien determinasi yang bersumber dari *Output Eviews 9.0*. Hasil penelitian ini memberikan informasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil Daerah (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

<sup>18</sup> Faisal Humiang dkk, 2022

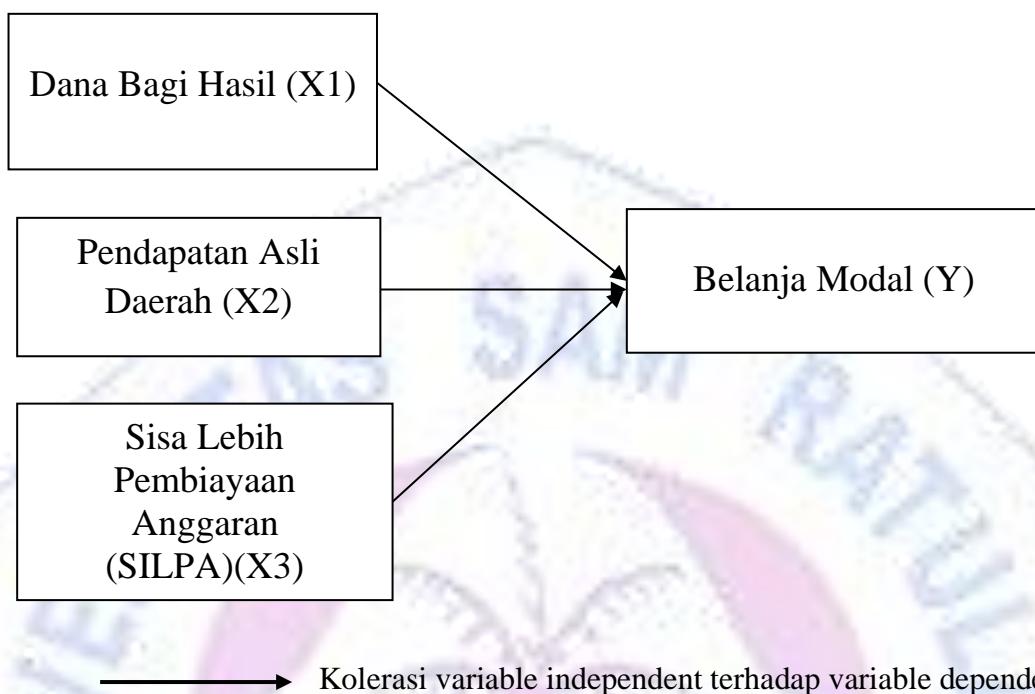
<sup>19</sup> Marselina A. Pekambani dkk, 2023

<sup>20</sup> Choms Gary Ganda Tua Sibarani dkk, 2022

<sup>21</sup> Dirvi Surya Abbas dkk, 2021

## Kerangka Pemikiran

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**



→ Korelasi variable independent terhadap variable dependen

## Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :

- **Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal**  
 $H_0$  : Tidak ada hubungan korelasi antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal  
 $H_1$  : Ada hubungan korelasi antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal
- **Korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**  
 $H_0$  : Tidak ada hubungan korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal  
 $H_1$  : Ada hubungan korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal
- **Korelasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**  
 $H_0$  : Tidak ada hubungan korelasi antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal  
 $H_1$  : Ada hubungan korelasi antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal

## 2. METODE PENELITIAN

### Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional yang merupakan penelitian atau kajian deskriptif dimana peneliti tidak hanya mendeskripsikan variabel-variabelnya tapi juga menguji sifat hubungan diantara variabel kuantitatif. (Setyosari : 2010)<sup>22</sup>, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2011-2022. Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)), LRA Pendapatan Dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan jurnal-jurnal ilmiah. Selain itu, penulis juga melakukan studi literature untuk mendapatkan teori yang

<sup>22</sup> Setyosari, 2020

mendukung penelitian, referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Data penelitian bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari laporan ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Belanja Modal, Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2011 sampai 2022.

### **Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran**

1. Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, pengukuran variabel Belanja Modal diukur dalam satuan Rupiah.
2. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) diukur dalam satuan Rupiah.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dalam satuan Rupiah.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) diukur dalam satuan Rupiah.

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan metode interpolasi, metode analisis korelasi antara Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis Dan Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara. Maka digunakan data sekunder yang bersumber dari LRA BPKPD Minahasa Tenggara Tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 Data sekunder tersebut diestimasikan dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis korelasi Pearson Correlation Product Moment sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

### **Analisis Interpolasi**

Interpolasi data merupakan metode pemecahan data menjadi data triwulan atau bentuk kuartalan, dimana data setahun dibagi menjadi empat data dalam bentuk kuartalan.

**Tabel 2**  
**Data Kuartal Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara**

Tahun	Dana Bagi Hasil (DBH) x1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) x2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) x3	Belanja Modal y
2011Q1	4.180422	1.478664	22.40027	36.78662
2011Q2	4.377453	1.271898	20.88904	35.64507
2011Q3	4.529516	1.131367	19.40063	34.55373
2011Q4	4.636609	1.05707	17.93505	33.51259
2012Q1	4.698734	1.049008	16.4923	32.52165
2012Q2	4.715891	1.10718	15.07238	31.58091
2012Q3	4.688078	1.231586	13.67529	30.69038
2012Q4	4.615297	1.422227	12.30102	29.85005
2013Q1	4.280828	1.78207	8.81857	25.91399
2013Q2	4.204797	2.063992	8.342367	26.43245
2013Q3	4.170484	2.370961	8.741398	28.25948
2013Q4	4.177891	2.702977	10.01566	31.39509
2014Q1	4.536195	3.223047	15.10516	40.06056
2014Q2	4.503367	3.539953	16.9539	44.12481
2014Q3	4.388586	3.816703	18.50187	47.80912
2014Q4	4.191852	4.053297	19.74907	51.1135
2015Q1	3.452188	4.213133	20.95531	51.72723
2015Q2	3.275938	4.384055	21.49706	55.19602
2015Q3	3.202125	4.529461	21.63413	59.20914
2015Q4	3.23075	4.649352	21.3665	63.76661
2016Q1	3.747398	4.21232	20.06302	77.98088
2016Q2	3.826664	4.493742	19.23848	79.98205
2016Q3	3.854133	4.962211	18.26173	78.88259
2016Q4	3.829805	5.617727	17.13277	74.68248
2017Q1	3.550711	8.006656	15.03267	56.48204
2017Q2	3.503977	8.417719	13.92683	50.44052
2017Q3	3.486633	8.397281	12.99633	45.65824
2017Q4	3.49868	7.945344	12.24117	42.1352
2018Q1	3.698203	5.33257	10.72472	43.66615
2018Q2	3.705797	4.709367	10.69491	41.14366
2018Q3	3.679547	4.346398	11.21509	38.36251
2018Q4	3.619453	4.243664	12.28528	35.32268
2019Q1	3.432898	5.294758	16.42523	26.69719
2019Q2	3.342164	5.355055	17.58752	25.27081
2019Q3	3.254633	5.318148	18.29189	25.71656
2019Q4	3.170305	5.184039	18.53836	28.03444
2020Q1	2.421641	4.607766	17.07571	42.06815
2020Q2	2.610734	4.417234	16.90685	44.19279
2020Q3	3.070047	4.267484	16.78057	44.25207
2020Q4	3.799578	4.158516	16.69687	42.24599
2021Q1	5.922883	4.254117	18.03711	30.24432
2021Q2	6.74343	4.161195	17.48602	27.27962
2021Q3	7.384773	4.043539	16.42495	25.42165
2021Q4	7.846914	3.901148	14.85392	24.67041
2022Q1	8.129852	3.734023	12.77292	25.02591
2022Q2	8.233586	3.542164	10.18195	26.48815
2022Q3	8.158117	3.32557	7.081016	29.05712
2022Q4	7.903445	3.084242	3.470109	32.73282

Sumber : Data Diolah (Excell,2023)

### Analisis Korelasi Dilihat dari Keeratan Hubungan

**Tabel 3**  
**Hasil Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal**

Correlation Probability	X1	X2	X3	Y
X1	1.000000 -----			
X2	-0.292339 0.0438	1.000000 -----		
X3	-0.401651 0.0047	0.040704 0.7836	1.000000 -----	
Y	-0.438254 0.0018	0.376980 0.0083	0.437063 0.0019	1.000000 -----

*Sumber :Data Diolah (Lampiran), 2023*

$$rx1,y = \frac{n(\sum x1, y) - (\sum x1)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x1^2)} - (\sum x1)^2(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}$$

$$rx2,y = \frac{n(\sum x2, y) - (\sum x2)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x2^2)} - (\sum x2)^2(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}$$

$$rx3,y = \frac{n(\sum x3, y) - (\sum x3)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x3^2)} - (\sum x3)^2(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}$$

- Nilai  $rx1,y$  sebesar -0.438254 menunjukkan bahwa hubungan x1 dengan y ketika variabel lainnya konstan, adalah memiliki hubungan sedang. Nilai correlation yang diperoleh bernilai negatif, maka bisa diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel yaitu tidak searah. Dengan nilai P-Value < 0,05 sebesar 0.0018 maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Belanja Modal.
- Nilai  $rx2,y$  sebesar 0.376980 menunjukkan bahwa hubungan x2 dengan y ketika variabel lainnya konstan, adalah memiliki hubungan rendah. Nilai correlation yang diperoleh bernilai positif, maka bisa diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel yaitu searah. Dengan nilai P-Value < 0,05 sebesar 0.0083 maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal.
- Nilai  $rx3,y$  sebesar 0.437063 menunjukkan bahwa hubungan x3 dengan y ketika variabel lainnya konstan, adalah memiliki hubungan sedang. Nilai correlation yang diperoleh bernilai positif, maka bisa diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel yaitu searah. Dengan nilai P-Value < 0,05 sebesar 0.0019 maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan Belanja Modal.

## Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis diatas, dapat dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan korelasi masing-masing variabel independent (bebas) terhadap variabel dependent (terikat), antara lain : Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH)(X<sub>1</sub>), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X<sub>2</sub>), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)(X<sub>3</sub>) terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada korelasi secara signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di Kabupaten Minahasa Tenggara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Fakta atau kondisi lapangan yang terjadi, mengindikasikan jika pengalokasian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kurang berkontribusi maksimal bagi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam anggaran Belanja Modal, seperti pembangunan fasilitas sarana publik (bidang infrastruktur, irigasi, pelatihan-pelatihan teknis, penelitian dan sebagainya) yang langsung menyentuh atau dinikmati masyarakat dalam jangka waktu pendek. Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Minahasa Tenggara yang kurang fleksibel dari segi pemanfaatannya menyebabkan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sepenuhnya leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran belanja modal untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonominya, yang antara lain berupa, pembangunan sarana dan prasarana dasar (fisik ataupun non-fisik) yang sepatutnya ikut andil dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara yang optimal. Banyaknya dana yang tidak terserap secara optimal oleh kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan kurang optimalnya penggunaan anggaran daerah, dimana banyaknya dana silpa setiap tahunnya. Dana silpa ini, menunjukkan kelemahan Pemerintah Daerah dalam penyerapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang perbaikan ekonomi masyarakat sehingga dana yang besar tersebut tidak mampu direalisasikan dalam bentuk belanja modal secara optimal. Untuk itu pemerintah daerah seharusnya membuat "Master Plan" yang lebih matang untuk mengoptimalkan pengeluaran untuk sektor-sektor produktif dengan merangjang program program inovatif yang langsung menyentuh kebutuhan rill masyarakat dan menggali potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis penelitian ini yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara. Terdapat kesamaan penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dilakukan oleh Yani Rizal & Erpita (2019)<sup>23</sup> jurnal Samudra ekonomika Vol 3 No 1 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kota Langsa, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Kota Langsa. Data yang digunakan adalah data *time series* tahun 2006-2017, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, data yang digunakan adalah data *time series*, metode analisis regresi linier sederhana, uji t, dan analisis koefisien determinasi, hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Langsa. Dari analisis koefisien determinasi diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi belanja modal Kota Langsa sebesar 40,6%, sedangkan sisanya 59,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Ordinary Least Squares* pada penelitian mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),

<sup>23</sup> Yani Rizal & Erpita, 2019

terhadap Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai bahwa:

1. Secara parsial Dana Bagi Hasil (DBH) ada korelasi yang signifikan dengan Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada korelasi yang signifikan dengan Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ada korelasi yang signifikan dengan Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan hasil *metode ekonometrik* pada penelitian mengenai analisis korelasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan alokasi belanja modal maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dan pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa berkurang. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dengan cara membeli barang-barang belanja modal yang produktif.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis korelasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara diharapkan lebih mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), untuk mendanai setiap kebutuhan daerah agar dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Perlu adanya sektor ekonomi baru yang dibuka atau memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki guna memaksimalkan pendapatan asli daerah.
3. Perlu adanya program kerja prioritas dari pemerintah daerah guna menangani permasalahan serta kebutuhan yang dimiliki oleh daerah.
4. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya sampel dan objek penelitian lebih diperluas lagi dan bisa juga membandingkan dengan objek lainnya serta menambahkan jangka waktu penelitian yang lebih panjang dan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal sehingga hipotesis yang ingin diharapkan dapat tercapai.

### DAFATAR PUSTAKA

Abdullah. 1995. *Dictionary of accounting*, Jakarta : Mario GrafiKA

Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik* penerbit BPFE, Yogyakarta

Bratakusuma Deddy S, Solihin Dadang. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama.

Choms Gary Ganda Tua Sibarani, Jihen Ginting, Vivi Afriliani, Nasrullah Hidayat (2022) Vol 3 No 2. *Influence of Profit Sharing Funds and Regional Financial Performance in the Previous Year on the Allocation of Capital Expenditures in Provincial Governments in Indonesia in 2016 – 2020.*

Darise Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah* Edisi Kedua : penerbit PT. Indeks, Jakarta

Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim, Imam Novayandi (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Faisal Humiang, Hendrik Manossoh, Peter Kapojos (2022) Vol 5 No 2. Analisis Kontribusi Komponen Penerimaan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bitung

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP-AMP YKPN

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* Penerbit Andi: Yogyakarta *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat

Margono (2021). Analisis Pengaruh PAD, DBH,DAU,DAK, dan SILPA terhadap Belanja Modal.

Marselina A. Pekambani, M.E. Perseveranda, Rere P. Bibiana (2023) Vol 7 No 2. *Effect of Local own source revenue, general allocation funds, special allocation funds, and profit-sharing funds on capital expenditure.*

Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana

Sheila Ardhan Nuarisa (2013) Vol 2 No 1. Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Siregar Baldric, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YPKP.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi public untuk keuangan dan pembangunan daerah Edisi pertama*, Yogyakarta, Andi.

Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016) Vol 1 No 1. Pengaruh PAD, DAU, Dan DBH Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh).

Tryas Chasbiandani, Rafrini Amyulianthy, Anisa May (2022) Vol 2 No 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yani Rizal & Erpita (2019) jurnal Samudra ekonomika Vol 3 No 1 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kota Langsa.